

Kurikulum pendidikan agama Kristen yang inklusif dan solider: Respons etika solidaritas Kristen terhadap fragmentasi sosial era woke culture

Daniel Sudibyo Tjandra 
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

Correspondence:

danieltjandra@sttikat.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v10i3.987>

Article History

Submitted: Jan. 16, 2024
Reviewed: Marc. 27, 2024
Accepted: Dec. 30, 2024

Keywords:

cancel culture;
Christian ethic of solidarity;
Christian education curriculum;
inclusive Christian education;
Rebecca Todd Peters;
safe space;
woke culture;
etika solidaritas kristiani;
kurikulum pendidikan agama Kristen;
pendidikan kristiani inklusif;
ruang aman

Copyright: ©2024, Authors.

License:



Abstract: Woke Culture and Cancel Culture present new ethical challenges in the digital society, including within Christian Religious Education in Indonesia. The resulting social fragmentation—driven by confrontational justice narratives—demands a more dialogical and solidaristic curriculum. This study employs a constructive-theological approach to formulate a responsive model of Christian Religious Education curriculum, grounded in Rebecca Todd Peters' Christian ethic of solidarity. Her framework rejects individualistic morality and symbolic violence, emphasizing the cultivation of dialogical spaces (brave spaces), solidarity with the marginalized, and the integration of orthodoxy, orthopathy, and orthopraxy. The findings reveal that a solidaristic and contextual curriculum can form learners into agents of justice who are compassionate, critically engaged, and dialogically capable in pluralistic societies. Such a curriculum functions not merely as doctrinal instruction, but as a transformative space of faith formation, relevant both theologically and ethically.

Abstrak: *Woke Culture* dan *Cancel Culture* menghadirkan tantangan etis baru dalam masyarakat digital, termasuk dalam pendidikan agama Kristen di Indonesia. Fragmentasi sosial yang diakibatkan oleh nilai-nilai keadilan yang konfrontatif menuntut kurikulum yang lebih dialogis dan solider. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif-teologis untuk merumuskan model kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang responsif terhadap tantangan era woke, dengan menjadikan etika solidaritas Kristen dari Rebecca Todd Peters sebagai fondasi utama. Etika ini menolak moralitas individualistik dan kekerasan simbolik, serta menekankan pembentukan ruang dialogis (*brave space*), keberpihakan pada yang tertindas, dan integrasi antara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang solider dan kontekstual dapat membentuk peserta didik menjadi agen keadilan yang penuh kasih, kritis terhadap ketidakadilan, dan mampu berdialog dalam masyarakat plural. Kurikulum ini menjadi sarana formasi iman yang relevan, tidak hanya secara doktrinal, tetapi juga secara sosial dan etis.

Pendahuluan

Isu keadilan sosial terus menjadi pusat perhatian berbagai kelompok di sepanjang sejarah. Berbagai ketimpangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, gender, dan akses terhadap hak hidup yang layak menjadi pemicu munculnya narasi dan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan. Dalam dua dekade terakhir, muncul istilah *woke*, yang awalnya bermakna kesada-

ran terhadap ketidakadilan, terutama dalam isu rasial di Amerika Serikat.¹ Namun istilah ini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial-kultural global yang membawa semangat keadilan interseksional: mencakup gender, ras, seksualitas, hingga status migrasi dan identitas minoritas. *Woke* bukan sekadar istilah, melainkan pergeseran moral dan politik yang membentuk ulang persepsi keadilan sosial secara radikal — dan gerakan ini tidak lagi terbatas di Barat.

Melalui media sosial seperti Twitter (sekarang X), YouTube, dan TikTok, nilai-nilai *Woke Culture* menyeberangi batas geografis dan menjangkau komunitas global, termasuk Indonesia. Hashtag seperti #BlackLivesMatter, #MeToo, dan gerakan queer global diserap secara selektif oleh generasi muda Indonesia, terutama melalui konten visual dan narasi keadilan digital.² Masuknya nilai-nilai ini ke Indonesia dapat dilacak melalui fenomena digital aktivisme, perdebatan tentang gender di sekolah-sekolah, hingga tuntutan perubahan terminologi dalam kurikulum atau kebijakan publik. Bahkan, pada tingkat tertentu, nilai *woke* telah memengaruhi diskursus keagamaan dan pendidikan, termasuk dalam Pendidikan Agama Kristen. Generasi muda Kristen kini hidup dalam ketegangan antara keyakinan iman dan tuntutan kultural yang terus berubah.

Woke Culture telah membawa narasi baru tentang inklusivitas, keadilan, dan solidaritas. Namun, ironisnya, perjuangan keadilan ini kerap disertai pendekatan konfrontatif terhadap pihak yang dianggap tidak sepeham.³ Fenomena *Cancel Culture*, yaitu praktik mengucilkan atau menyerang individu yang dianggap melanggar norma moral baru, menjadi bagian dari cara kerja *Woke Culture* dalam “menegakkan keadilan”. Di berbagai negara, tokoh publik seperti J.K. Rowling dan Kathleen Stock telah menjadi korban dari tindakan ini karena mempertahankan pandangan biologis tentang perempuan. Mereka dikecam, kehilangan pekerjaan, bahkan diserang secara verbal — bukan karena kebencian, melainkan karena tidak sejalan dengan doktrin *woke*.⁴ Tindakan ini memperlihatkan bahwa gerakan *woke* tidak hanya membawa pesan keadilan, tetapi juga menyimpan potensi represi terhadap kebebasan berpikir.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini juga tampak. Perubahan-perubahan naratif tentang gender, identitas, dan keadilan sosial mulai masuk ke dalam ruang-ruang akademik dan religius. Di beberapa sekolah Kristen dan universitas, muncul diskusi internal tentang apakah kurikulum harus menyesuaikan diri dengan narasi global ini.⁵ Beberapa LSM dan komunitas berbasis anak muda mendorong pengakuan terhadap identitas non-biner, revisi terhadap pelajaran agama, serta penghapusan narasi normatif yang dianggap diskriminatif. Di sisi lain, kelompok konservatif, termasuk sebagian gereja, menanggapi dengan kekhawatiran bahwa Pendidikan Agama Kristen akan kehilangan orientasi iman jika terlalu menyesuaikan diri

¹ Gilles Paché, “Woke Culture Syndrome: Is Research in Management Under Threat?,” *Journal of Management Research* 14, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.5296/jmr.v14i1.19323>.

² Aldi Abdillah dan Anggi Maringan Hasiholan, “‘Beri Aku Air Hidup, Tuhan!’: Seru Perempuan Samaria dan Gen-Z (Suatu Tafsir Kontrapuntal Yohanes 4:14 sebagai Laku Spiritualitas Generasi Z Indonesia Era Postmodern),” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 5, no. 2 (2021): 176–91, <https://doi.org/10.37368/ja.v5i2.291>.

³ Susan Gardner and Wayne Henry, “Education in the Age of Woke,” *Journal of Didactics of Philosophy* 8 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.46586/jdph.2024.11354>.

⁴ Fiona Ward, Charley Ross, and Ali Pantony, “A Complete Breakdown of the J.K. Rowling Transgender Comments Controversy,” *Glamour*, 2024, <https://www.glamourmagazine.co.uk/article/jk-rowling-transgender-comments-controversy>.

⁵ Saya tidak dalam kapasitas untuk menyebutkan secara spesifik Sekolah Tinggi Teologi atau Filsafat tertentu di Indonesia yang secara eksplisit membahas isu ini. Namun, dalam diskursus publik, terdapat persepsi terhadap beberapa institusi yang kerap dikategorikan sebagai “liberal” karena keterbukaannya terhadap isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, gender, dan pluralisme.

dengan tekanan sosial.⁶ Polarisasi ini memperlihatkan adanya fragmentasi sosial yang nyata juga dalam tubuh gereja dan lembaga pendidikan Kristen.

Dalam situasi yang kompleks ini, Pendidikan Agama Kristen menghadapi dilema: Bagaimana mengajarkan keadilan dan kasih sesuai iman Kristen tanpa jatuh pada absolutisme moral ataupun relativisme nilai. Di sinilah kerangka etika solidaritas Kristen yang ditawarkan oleh Rebecca Todd Peters menjadi penting. Peters menolak pendekatan moral yang individualistik dan mengusulkan paradigma etika yang berakar pada keterhubungan, keberpihakan terhadap kelompok tertindas, dan pembaruan struktural. Namun, berbeda dari sebagian praktik *woke*, Peters tidak menyarankan konfrontasi yang membungkam, melainkan menekankan praktik dialogis, kasih yang membebaskan, dan reformasi struktural tanpa kekerasan moral.⁷

Etika solidaritas Kristen menurut Peters dapat memberikan arah teologis dan pedagogis bagi kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang tangguh di tengah tantangan *Woke Culture*. Kurikulum Pendidikan Agama Kristen tidak bisa lagi bersifat hanya dogmatis-normatif. Ia perlu menjadi wadah formasi etis yang membekali siswa untuk memahami struktur ketidakadilan sembari menghidupi kasih yang tidak mematikan dialog. Kurikulum harus mengajarkan bahwa keadilan bukanlah membungkam lawan, tetapi merangkul dengan pengampunan; bukan hanya menuntut ruang aman (*safe space*), tetapi juga membentuk ruang dewasa (*brave space*). Dalam model ini, siswa diajak untuk menjadi subjek etis yang mampu berdiri bersama mereka yang tertindas, tanpa menjadi penganiaya terhadap yang berbeda pendapat.

Berdasarkan realitas ini, penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk merancang kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang inklusif dan solider, dengan memanfaatkan etika solidaritas Kristen sebagai kerangka dasarnya. Penelitian ini akan mengevaluasi pengaruh fragmentasi sosial akibat *Woke Culture* terhadap pendidikan Kristen di Indonesia dan mengeksplorasi bagaimana pemikiran Peters dapat diimplementasikan secara kontekstual. Dengan demikian, kurikulum Pendidikan Agama Kristen bukan hanya menjadi tempat pembelajaran doktrin, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter yang mencerminkan belas kasih Kristus—sebuah ruang yang merangkul keadilan, tetapi juga menolak pengucilan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif-teologis, yang bertujuan membangun kerangka kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang inklusif dan solider dengan mendialogkan etika solidaritas Kristen ala Peters dengan konteks fragmentasi sosial akibat *Woke Culture* di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis secara kritis dinamika sosial-budaya dan perkembangan diskursus keadilan dalam ruang publik digital dan pendidikan, tetapi juga merumuskan alternatif praksis kurikulum yang transformatif. Melalui rekonstruksi teologis dan pedagogis, penelitian ini mengembangkan model kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang menekankan keberpihakan terhadap yang terpinggirkan tanpa kehilangan daya dialog, serta mengusulkan format pembelajaran yang membentuk ruang keberanian (*brave space*), bukan hanya ruang aman (*safe space*), sebagai respons atas tantangan etis dan identitas dalam era *woke*.

Dinamika *Woke Culture* dan Fragmentasi Sosial di Indonesia

Woke Culture telah merasuk ke dalam ruang publik Indonesia tidak hanya sebagai produk budaya Barat, tetapi juga sebagai ideologi baru yang menyusup melalui praktik digital, aktivisme daring, dan pembungkaman ulang nilai-nilai keadilan sosial. Wacana ini membawa serta

⁶ Editorial, "Woke Sociology, Woke Jesus," *Journal of Sociology and Christianity* 14, no. 1 (2024): 14–18.

⁷ Rebecca Todd Peters, *Solidarity Ethics Transformation In a Globalized World* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014).

semangat interseksionalitas yang menyoroti ketimpangan berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, dan identitas minoritas.⁸ Fenomena ini tidak hanya terbaca dalam gelombang diskusi *online*, tetapi juga dalam ketegangan sosial yang nyata di ruang pendidikan dan keagamaan, khususnya di Indonesia. Generasi muda digital Indonesia menunjukkan intensitas tinggi dalam menggunakan media sosial bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga untuk advokasi isu-isu sosial-politik seperti kesetaraan gender, keadilan lingkungan, hingga hak-hak kelompok minoritas. Media sosial menjadi medium utama dalam membangun *digital identity* yang terhubung dengan nilai-nilai global, termasuk prinsip-prinsip *Woke Culture*.

Penelitian Deni Zein Tarsidi dkk., menyoroti, aktivisme digital di kalangan pemuda Indonesia telah mengaburkan batas antara ruang privat dan publik, dan mendorong munculnya bentuk-bentuk *digital civic engagement* yang berbasis narasi moral kolektif dan tekanan sosial. Hal ini membuat media sosial tidak hanya sebagai kanal ekspresi, tetapi juga arena pembentukan norma-norma baru, termasuk standar etika yang sering bersifat konfrontatif terhadap pandangan konservatif.⁹ Dalam konteks ini, internet telah menjadi *locus* yang menyerap *Woke Culture* di segala belahan dunia ke Indonesia.

Di Indonesia, praktik *Cancel Culture* mulai mendapatkan perhatian luas, khususnya di kalangan penggemar budaya populer seperti K-pop. Tindakan ini seringkali dimulai dengan viralnya informasi pelanggaran yang dilakukan oleh selebritas, kemudian diikuti dengan gerakan boikot, penghapusan dukungan di media sosial, hingga seruan pemecatan atau penghentian kerja sama komersial. Fenomena ini menjadi bentuk demokratisasi opini publik: masyarakat, khususnya generasi milenial dan Z, tidak lagi sekadar menjadi konsumen pasif, melainkan aktor yang aktif dalam membentuk lanskap moral digital. Namun, *Cancel Culture* di Indonesia tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berdiri di atas pondasi budaya lokal seperti rasa malu (*shame culture*), gotong royong, dan pengaruh norma-norma religius dan sosial yang kuat. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni sosial, tindakan kolektif seperti *cancel* dapat dianggap sebagai cara mempertahankan tatanan etika bersama. Namun, di sisi lain, muncul tantangan: bagaimana menjamin bahwa tindakan *cancel* benar-benar dilandasi oleh informasi yang sah, bukan prasangka atau emosi sesaat?

Kisah seperti kasus Seungri atau Woojin dalam dunia K-pop, serta kasus Gofar Hilman di dunia hiburan Indonesia, mencerminkan betapa kuatnya efek *Cancel Culture* terhadap

⁸ Istilah *interseksionalitas* mengacu pada suatu kerangka pemikiran yang mengkaji bagaimana berbagai bentuk ketidakadilan, seperti rasisme, seksisme, dan ketimpangan kelas, dapat saling berkelindan dan memperparah penindasan terhadap kelompok tertentu. Lihat: Brenda L. Widger, "Woke Religion: Effects of Secularism and Progressive Politics on 21st Century Mainline Churches as Demonstrated Through the Worship and Witness of College-Age Students" (Liberty University, 2023), 16. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Kimberlé Crenshaw dari Fakultas Hukum Columbia pada tahun 1989 melalui tulisan akademisnya. Ia menggunakan konsep ini untuk menunjukkan bagaimana identitas-identitas seperti ras, gender, dan kelas sosial tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling memengaruhi satu sama lain. Berdasarkan pengamatannya terhadap kekerasan yang dialami perempuan kulit hitam di Amerika Serikat, Crenshaw menemukan, perjuangan melawan rasisme lebih banyak menyoroti laki-laki kulit hitam, sementara perjuangan melawan seksisme lebih terfokus pada perempuan kulit putih. Akibatnya, perempuan kulit hitam yang mengalami penindasan ganda menjadi kelompok yang sering kali terabaikan. Crenshaw kemudian mendalami bagaimana interaksi antara identitas-identitas yang termarginalkan ini berhadapan langsung dengan sistem-sistem dominasi dan diskriminasi yang mapan. Lihat: Ellen Roderick, "Woke Culture in Canada? Anthropological Errors and Opportunities for Mission," *Roczniki Teologiczne* 69, no. 3 (2022): 71–101, <https://doi.org/10.18290/rt22693.6>.

⁹ Deni Zein Tarsidi et al., "Social Media Usage and Civic Engagement among Indonesian Digital Natives: An Analysis," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20, no. 2 (2023): 257–69, <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>.

reputasi publik. Tidak hanya menghapus dukungan, masyarakat juga dapat memaksa pelaku keluar dari ruang publik digital, bahkan sebelum adanya proses hukum formal. Di sinilah *Cancel Culture* menjadi pisau bermata dua. Ia bisa menjadi instrumen keadilan sosial yang efektif, tetapi juga dapat melahirkan ketidakadilan baru ketika tuduhan belum terbukti secara hukum.

Fenomena ini menjadi semakin kuat seiring meningkatnya literasi digital dan partisipasi *online*. Media sosial, terutama TikTok, Twitter, dan Instagram, memberi panggung bagi siapa-pun untuk bersuara. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak semua suara dibangun di atas data yang valid. *Trial by social media* dapat terjadi, mengorbankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi fitnah atau *doxing*. Selain itu, *Cancel Culture* rentan mengikis ruang dialog. Alih-alih membangun percakapan yang konstruktif tentang kesalahan dan pertobatan, tindakan *cancel* justru sering berujung pada pengucilan. Hal ini dapat melanggengkan polarisasi dan *spiral of silence*, di mana individu atau kelompok dengan pandangan berbeda memilih bungkam agar tidak menjadi target berikutnya. Akibatnya, diskursus publik menjadi miskin perspektif dan cenderung dikendalikan oleh suara mayoritas yang paling vokal.

Meskipun *Cancel Culture* sering kali dianggap sebagai produk budaya luar (terutama dari Korea Selatan atau Barat), nyatanya Indonesia memiliki bentuk-bentuk tradisional dari sanksi sosial yang mirip, perbedaannya pada medium dan skalanya. Dulu, sanksi sosial terbatas pada komunitas lokal; kini, media sosial memungkinkan sanksi tersebut menyebar secara masif dan lintas batas wilayah dalam waktu singkat.¹⁰

Dampak dari dua kasus ini terhadap dunia pendidikan sangat signifikan. *Cancel Culture* bukan hanya membungkam tokoh, tetapi juga menciptakan iklim takut dalam menyampaikan opini yang dianggap menyimpang dari arus utama keadilan digital.¹¹ Hal ini berpotensi melumpuhkan misi pendidikan sebagai ruang dialog dan pertumbuhan intelektual. Pendidikan Agama Kristen, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, menghadapi tantangan ganda: mempertahankan integritas iman dan pada saat yang sama merespons narasi keadilan sosial yang terus berubah. Jika tidak dikelola secara reflektif, kurikulum Pendidikan Agama Kristen dapat terjebak dalam dua ekstrem: konservatisme yang menutup diri, atau akomodasi radikal yang kehilangan akar iman.

Analisis Wildani Hefni menegaskan, digitalisasi etika telah melahirkan masyarakat yang sangat reaktif dan emosional terhadap narasi identitas. Fragmentasi terjadi ketika perbedaan pendapat dianggap sebagai bentuk ancaman eksistensial, bukan peluang untuk dialog.¹² Pendidikan yang semestinya menjadi ruang pembentukan etis justru menjadi ladang pertempuran ideologis yang mempertaruhkan reputasi personal dan kelembagaan. Hal ini menjelaskan meningkatnya kekhawatiran para pendidik Kristen tentang pergeseran nilai dan tekanan konformitas dalam sistem pendidikan. Dalam konteks inilah, kurikulum Pendidikan Agama Kristen harus merumuskan ulang pendekatan pedagogisnya. Bukan sekadar menyampaikan dog-

¹⁰ Sofwa Nurul Karimah, "Cancel Culture di Indonesia: Membawa Perubahan atau Hanya Sanksi Sesaat?," Kompasiana.com, 2024, <https://www.kompasiana.com/sofwanurulkarimah8598/66f2bdb3ed641513f937f332/cancel-culture-di-indonesia-membawa-prubahan-atau-hanya-sanksi-sesaat>.

¹¹ Melisa Bunga Altamira and Satwika Gemala Movementi, "Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Vokasi Indonesia Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 37–45, <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1177>.

¹² Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>.

ma atau moralitas normatif, tetapi menjadi kurikulum yang membekali siswa dengan kepekaan etis, kemampuan berdialog lintas nilai, dan keberanian eksistensial untuk menyatakan iman dalam dunia yang plural dan reaktif. Kurikulum yang solider tidak hanya berpihak pada yang tertindas, tetapi juga menghindari partisipasi dalam kekerasan simbolik terhadap mereka yang berbeda pendapat.

Penting untuk dicatat bahwa *Cancel Culture* di Indonesia belum mencapai tingkat intensitas seperti di negara lain, misalnya Korea Selatan atau Cina, di mana konsekuensinya bisa sangat ekstrem. Di Indonesia, masih sering ditemui selebritas atau figur publik yang “*come back*” setelah beberapa waktu, ketika isu sudah mereda. Ini mencerminkan karakter masyarakat yang mudah memaafkan namun juga cepat melupakan, sehingga *Cancel Culture* di sini lebih bersifat temporer daripada transformatif.

Sebagai respons, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat yang terkoneksi dengan kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Pengguna media sosial perlu belajar membedakan antara kritik yang membangun dan penghakiman massal. Sikap kritis terhadap informasi, memahami konteks, serta kemampuan untuk menunda reaksi sebelum semua data terkumpul adalah langkah awal untuk menciptakan ruang digital yang adil dan beradab. Dalam jangka panjang, *Cancel Culture* bisa menjadi katalis positif jika dikelola secara bijak. Ia mampu mengangkat isu-isu yang selama ini terpinggirkan seperti pelecehan seksual, diskriminasi, dan eksploitasi pekerja. Namun, jika digunakan tanpa refleksi, *Cancel Culture* dapat berubah menjadi alat represi digital yang mengancam kebebasan berekspresi dan keadilan prosedural.

Kritik terhadap Kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang Dogmatis dan Non-Dialogis dalam Bayangan Budaya Woke

Model kurikulum Pendidikan Agama Kristen dominan saat ini menunjukkan kecenderungan dogmatis yang kuat. Pengajaran berfokus pada transfer kognitif doktrin yang bersifat absolut, sehingga menutup ruang refleksi kritis.¹³ Kurikulum seperti ini melanggengkan asumsi bahwa iman hanya bisa diwariskan melalui rumusan yang final, bukan melalui dialektika pengalaman dan kesadaran historis peserta didik. Realitas bahwa peserta didik hidup dalam dunia yang plural, dinamis, dan penuh ketegangan identitas sering kali diabaikan. Kurikulum menjadi monumen ortodoksi, bukan alat transformasi yang kontekstual dan membebaskan.

Keberadaan budaya *woke* hari ini menuntut respons yang lebih jujur dan terbuka dari Pendidikan Agama Kristen. Budaya ini membawa wacana keadilan sosial, identitas marginal, dan kesadaran historis ke tengah diskursus publik, termasuk dalam ruang kelas. Ketika Pendidikan Agama Kristen gagal terlibat dalam percakapan ini, ia kehilangan relevansinya di hadapan generasi yang gelisah akan ketidakadilan. Pendidikan Agama Kristen yang dogmatis cenderung menekan narasi alternatif dan menolak kompleksitas, padahal iman Kristen historisnya hidup dalam ketegangan dan dialog. Kebisuan terhadap ketimpangan sosial sama saja dengan menempatkan iman di sisi *status quo* yang menindas.

¹³ Kondisi ini ditemukan di hampir semua jenjang pendidikan Kristen, dengan intensitas yang paling nyata di tingkat perguruan tinggi. Sebagian kecil Sekolah Tinggi Teologi memang menunjukkan semangat ekumenis dan keterbukaan wacana, namun secara umum lembaga-lembaga tersebut lebih berperan sebagai perpanjangan ideologis dari sinode atau aliran gereja tertentu. Orientasi semacam ini menjadikan proses indoktrinasi lebih dominan ketimbang pembentukan pemikiran teologis yang reflektif dan kontekstual. Kurikulum yang disusun cenderung stagnan, tidak responsif terhadap kebutuhan publik, dan kurang menyentuh kompleksitas sosial masyarakat luas. Rumusan ideal yang terus-menerus diulang dalam desain kurikulum tidak pernah benar-benar menyentuh realitas yang dinamis di lapangan.

Doktrin yang tidak diintegrasikan dengan pengalaman hidup menjadi beban kognitif tanpa kekuatan transformasi. Ronald Sianipar dkk., menyebutkan, banyak kurikulum Pendidikan Agama Kristen gagal menyentuh realitas konkret peserta didik karena terlalu fokus pada pewarisan normatif. Siswa merasa tidak punya ruang untuk menyuarakan kegelisahan, perbedaan pandangan, dan pergulatan identitas mereka.¹⁴ Ketika narasi Pendidikan Agama Kristen tidak membuka dialog, maka yang tercipta hanyalah reproduksi spiritualitas pasif. Iman hanya menjadi hiasan moral, bukan kekuatan yang membentuk keadilan dan kesadaran sosial. Tidak bisa dipungkiri, pengajaran pendidikan agama Kristen masih bersifat eksklusif dan tidak kontekstual. Ketika pertanyaan tentang gender, keadilan ekonomi, lingkungan, dan toleransi muncul, guru cenderung mengalihkan atau menutup diskusi. Sikap seperti ini mengaburkan misi profetik pendidikan agama Kristen sebagai ruang pembentukan integritas dan keberanian moral. Ketakutan terhadap nilai-nilai *woke* justru mencerminkan keengganan untuk bergumul dengan teks suci secara kreatif dan kontekstual. Kekristenan yang enggan berdialog dengan dunia akan terjebak dalam nostalgia teologi yang steril.

Gelombang budaya *woke* menghadirkan cermin bagi dunia kekristenan. Ia mengajukan pertanyaan kritis terhadap bentuk-bentuk religiositas yang terlalu nyaman dengan privilej dan abai terhadap penderitaan. Ketika pendidikan agama enggan menyentuh luka-luka sosial, maka ruang-ruang non-religius justru mengambil alih fungsi kenabian. Kekristenan yang kehilangan keberpihakan pada yang tertindas mengalami disorientasi spiritual. Oleh sebab itu, pendidikan agama Kristen harus diorientasikan kembali sebagai arena untuk membangkitkan iman yang aktif dalam solidaritas dan keadilan, bukan sekadar penguatan identitas eksklusif.

Pendekatan pedagogis yang relevan adalah pendekatan yang bersifat partisipatif dan dialogis. Murid tidak dapat terus-menerus dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang memiliki pengalaman dan pertanyaan. Pembentukan iman harus melekat dengan realitas tempat siswa berada —baik secara budaya, ekonomi, maupun historis. Di dalam ruang itulah iman akan bertumbuh secara kontekstual dan berdaging. Pendidikan agama perlu membiarkan pertanyaan-pertanyaan kritis hidup, sebab hanya dari sanalah lahir pemahaman iman yang mendalam dan membebaskan.

Pembaruan kurikulum tidak cukup hanya pada level konten atau penambahan tema baru. Diperlukan konstruksi paradigma yang melibatkan keberanian untuk memperbarui cara pandang terhadap wahyu, gereja, dan dunia. Hal ini bukan melakukan rekonstruksi atau dekonstruksi, melainkan memberi suara untuk “wajah-wajah minor” dikaji dan didengarkan. Inilah semangat dari teologi konstruktif seutuhnya.¹⁵ Teologi yang menjadi fondasi pendidikan harus mampu membaca zaman dan tidak sekadar mempertahankan formulasi lama. Sejarah gereja menunjukkan bahwa pertumbuhan iman selalu beriringan dengan keberanian untuk menafsir ulang Injil dalam konteks yang baru. Maka, kurikulum yang otentik adalah yang berani hidup dalam ketegangan antara tradisi dan konteks, bukan yang memaksakan keseragaman.

Kurikulum yang relevan di era ini adalah kurikulum yang menghadirkan iman sebagai lensa untuk membaca realitas dengan kepekaan dan keberpihakan. Tantangan terbesarnya bukan pada konten, melainkan pada cara memaknai relasi antara iman dan dunia. Pendidikan

¹⁴ Ronald Sianipar et al., “Problematika Pengajaran Pendidikan Agama Kristen di Indonesia: Perspektif Regulasi, Kurikulum, dan Sarana Prasarana,” *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 145–54.

¹⁵ Jason A Wyman, *Constructing Constructive Theology: An Introductory Sketch* (Minneapolis: Fortress Press, 2017).

agama Kristen harus menjembatani keduanya, menjadi ruang perjumpaan yang membebaskan, bukan tembok yang memisahkan. Dari ruang ini akan lahir generasi yang tidak hanya percaya, tetapi juga berani bertindak demi kebenaran dan keadilan.¹⁶ Di situlah kekuatan Injil menemukan bentuknya yang paling radikal dan paling relevan.

Etika Solidaritas Kristen dalam Merespons *Cancel Culture* dan Peran Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Inklusif

Telah saya jelaskan di atas fenomena *Cancel Culture* di Indonesia semakin menonjol dalam interaksi digital, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam ruang-ruang digital seperti media sosial, pemuda Indonesia tidak hanya mengekspresikan opini, tetapi juga membentuk kembali etika publik, membangun narasi baru tentang kebenaran, dan bahkan menerapkan semacam “penghakiman moral” terhadap figur publik atau sesama warga digital. Dalam konteks ini, nilai-nilai *Woke Culture* tidak sekadar menjadi pilihan etis, melainkan cara pandang hidup yang menuntut kepekaan tinggi terhadap ketimpangan dan diskriminasi. Namun ironisnya, dalam upaya menciptakan keadilan, praktik ini kadang melahirkan bentuk baru dari eksklusi sosial—mereka yang tidak setuju atau dianggap melanggar norma *woke* justru dikucilkan secara ekstrem, bahkan kehilangan pekerjaan atau hubungan sosial.

Internet menjadi kanal partisipasi yang kuat untuk menyuarakan keprihatinan terhadap isu-isu keadilan, namun juga menjadi arena pertarungan naratif dan dominasi moral. Situasi ini menimbulkan dilema: bagaimana mungkin ruang yang seharusnya memerdekakan justru menjadi sarana pembungkaman? Di sinilah pendidikan agama Kristen harus hadir bukan sebagai benteng konservatisme, melainkan sebagai medan dialog yang etis dan solider, menghidupkan *brave space* yang memberi ruang bagi keberanian menyuarakan kebenaran dan mendengarkan perbedaan.

Saya menggunakan etika solidaritas Rebecca Todd Peters yang menawarkan fondasi etika solidaritas Kristen yang sangat relevan dalam situasi ini. Ia menolak moralitas individualistik yang mengabaikan struktur ketidakadilan dan justru mengusulkan bentuk keterlibatan iman yang bertanggung jawab secara kolektif. Etika Peters tidak hanya mengarahkan kita pada keberpihakan terhadap yang tertindas, tetapi juga menolak *Cancel Culture* yang ekstrem karena bertentangan dengan semangat kasih dan rekonsiliasi. Dalam perspektif Peters, dialog¹⁷ yang terbuka dan relasi yang memulihkan harus lebih dikedepankan daripada hukuman sosial yang merusak.¹⁸

Peters, dalam gagasan etika solidaritasnya, menawarkan suatu paradigma etika Kristen yang tidak berhenti pada ranah personal melainkan mengakar pada kesadaran struktural dan relasi sosial.¹⁹ Solidaritas baginya bukan sekadar empati, melainkan keberpihakan aktif kepada mereka yang tertindas. Etika ini menolak pendekatan netral terhadap realitas sosial dan mendorong keterlibatan moral yang transformatif—sebuah etika yang sangat dibutuhkan da-

¹⁶ Anggi Maringan Hasiholan, “Spiritualitas dan Teologi Sosial Pentakostal Asia,” *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 358–77.

¹⁷ Dalam pemikiran Peters, dialog bukan sekadar alat komunikasi, tetapi menjadi praksis etis yang mendalam dan mendarat, yakni *radical listening*—sebuah sikap mendengar secara aktif dengan komitmen terhadap keadilan dan keterbukaan terhadap transformasi diri. Peters menekankan bahwa solidaritas sejati tidak mungkin dibangun tanpa keberanian untuk berdialog lintas perbedaan, terutama dengan mereka yang secara struktural atau ideologis berseberangan. Dialog dipandang sebagai jalan menuju relasi yang memulihkan, bukan konfrontasi yang merusak.

¹⁸ Peters, *Solidarity Ethics Transformation In a Globalized World*.

¹⁹ Rebecca Todd Peters, *Trust Women: A Progressive Christian Argument for Reproductive Justice* (Boston: Beacon Press, 2018), 12.

lam dunia yang ditandai oleh polarisasi, *Cancel Culture*, dan semangat *woke* yang seringkali bersifat reaktif daripada reflektif.

Dalam konteks pendidikan agama Kristen, pemikiran Peters ini menjadi sangat relevan. Kurikulum pendidikan agama Kristen tidak cukup lagi bersifat informatif dan dogmatis, tetapi harus transformatif. Pendidikan iman tidak boleh berhenti pada ortodoksi (ajaran benar), melainkan harus disertai ortopraksis (praktik sosial), dan ortopati (empati yang membebaskan).²⁰ Ketiga dimensi ini mencerminkan pendekatan pedagogis integral yang menolak dikotomi antara iman dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, ruang kelas perlu direkonstruksi menjadi *brave space*—ruang keberanian untuk mendengar dan berbicara, untuk bertanya dan bergumul. Berbeda dengan *safe space* yang hanya menghindari konflik, *brave space* mendidik siswa menghadapi perbedaan secara dewasa. Dalam konteks ini, etika solidaritas Peters melatih siswa untuk membangun keberanian moral, bukan hanya kepatuhan dogmatis. Di ruang inilah, kesadaran terhadap ketidakadilan sosial dipertajam dengan sikap dialogis yang penuh kasih.

Penting untuk disadari bahwa semangat *woke* yang mendasari banyak gerakan sosial hari ini, meskipun lahir dari keinginan akan keadilan, juga membawa bahaya tersendiri ketika dijalankan tanpa kedalaman spiritual dan kebijaksanaan moral. *Cancel Culture* sebagai manifestasi ekstrem *Woke Culture* justru dapat menghasilkan bentuk baru diskriminasi dan intimidasi sosial. Di sinilah etika solidaritas Peters memberi sumbangan besar, karena ia tidak hanya mengajarkan keberpihakan, tetapi juga komitmen terhadap pemulihan relasi. Kurikulum pendidikan agama Kristen harus peka terhadap budaya digital dan pola partisipasi anak muda saat ini. Dalam era digital *civic engagement*, opini publik dibentuk sangat cepat, dan narasi ketidakadilan bisa viral dalam sekejap. Tanpa bimbingan moral, siswa dapat terjebak dalam semangat yang penuh kemarahan tanpa kebijaksanaan. Maka, kurikulum pendidikan agama Kristen perlu membekali siswa dengan kemampuan *discernment*—kemampuan membedakan antara keadilan sejati dan kemarahan destruktif, antara advokasi dan persekusi sosial.

Integrasi metode pembelajaran kontekstual menjadi penting. Studi kasus, refleksi naratif, dan pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa membaca isu-isu seperti kemiskinan, intoleransi, dan kekerasan gender dengan lensa kasih. Setiap isu tidak ditanggapi secara hitam-putih, melainkan melalui pertanyaan etis: bagaimana kasih dapat dihidupi dalam ketegangan ini? Bagaimana belas kasih Kristus menjadi daya tangkal terhadap budaya penghakiman?

Solidaritas Kristen yang diajarkan Peters juga menolak dikotomi palsu antara iman dan aktivisme sosial. Yesus, yang menjadi teladan etis utama dalam teologi Kristen, tidak pernah memisahkan kasih dan keadilan. Ia menegur tanpa membenci, mengampuni tanpa menyangkal kebenaran. Kurikulum pendidikan agama Kristen yang meneladani Yesus akan membentuk generasi yang bukan hanya benar secara teologis, tetapi juga dewasa secara etis dan emosional. Pendidikan agama Kristen juga perlu memberi ruang pada proses pencarian dan kegelisahan iman. Anak muda yang terpapar semangat *woke* sering kali tidak memiliki fondasi spiritual yang kokoh. Mereka terdorong oleh rasa ketidakadilan, tetapi tanpa peta moral yang jelas. Kurikulum yang solider tidak menakuti keraguan iman, melainkan menuntunnya kepada pengharapan Kristen yang membebaskan. Di sinilah pentingnya guru pendidikan agama Kristen sebagai fasilitator keberanian spiritual.

²⁰ Steven Jack Land, *Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom* (New York: Sheffield Academic Press, 2010).

Etika solidaritas Peters bukanlah moralitas yang memihak ideologi tertentu, tetapi membentuk manusia Kristen yang kritis dan penuh kasih. Ia memampukan siswa untuk mencintai keadilan tanpa menjadi hakim atas dunia, dan berdiri di sisi korban tanpa kehilangan martabat pelaku. Ini bukan relativisme moral, melainkan etika profetik yang berpijak pada Injil kasih Kristus. Dengan pendekatan ini, kurikulum pendidikan agama Kristen bukan hanya alat edukasi, tetapi menjadi *praksis kenabian*. Ia menjawab luka sosial—termasuk luka yang ditimbulkan oleh *Cancel Culture*—dengan etika yang memelihara dan membangun. Ia mengajarkan siswa untuk menjadi pembawa damai, bukan pengganda kebisingan moral. Dalam masyarakat yang saling membatalkan, siswa Kristen dipanggil untuk menjadi komunitas yang saling mengangkat.

Dalam terang etika solidaritas Peters, kurikulum pendidikan agama Kristen juga menjadi tempat formasi identitas Kristen yang kontekstual dan relevan. Identitas yang tidak menolak keadilan sosial, tetapi juga tidak mengabaikan kasih sebagai dasar iman. Formasi ini akan menumbuhkan murid yang memiliki kapasitas etis untuk berdialog, bertindak, dan bersaksi di tengah masyarakat yang kompleks dan rapuh. Kurikulum pendidikan agama Kristen yang berakar pada etika solidaritas Peters adalah undangan untuk menyusun kembali tujuan pendidikan Kristen: bukan mencetak siswa yang sekadar tahu doktrin, tetapi yang hidup dalam kasih yang solider. Ia mengajarkan bahwa iman sejati bukan hanya percaya, melainkan bertindak untuk menghidupi keadilan dan belas kasih dalam dunia yang terluka.

Kesimpulan

Kehadiran *Woke Culture* dan *Cancel Culture* di tengah masyarakat digital Indonesia membawa tantangan baru bagi pendidikan agama Kristen. Ketegangan antara nilai-nilai keadilan sosial yang diperjuangkan oleh budaya woke dan kecenderungan eksklusif dalam kurikulum agama menimbulkan fragmentasi sosial, bahkan dalam lingkungan pendidikan Kristen sendiri. Kurikulum yang selama ini bersifat dogmatis dan non-dialogis terbukti tidak mampu membekali siswa menghadapi kompleksitas zaman, terutama ketika mereka dituntut untuk bersuara atas isu-isu keadilan sambil tetap berakar pada iman.

Etika solidaritas Kristen yang ditawarkan oleh Rebecca Todd Peters menjadi fondasi etis dan teologis yang relevan untuk merancang kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang inklusif dan solider. Etika ini menekankan keberpihakan kepada yang tertindas, dialog yang membebaskan, serta reformasi struktural yang penuh kasih. Ia menolak bentuk kekerasan simbolik dan moral dari *Cancel Culture* serta mengusulkan pendekatan *brave space*—sebuah ruang pembelajaran yang memampukan siswa menyuarakan pendapat dan mendengarkan perbedaan dalam kasih. Dengan pendekatan konstruktif-teologis, penelitian ini menyusun model kurikulum pendidikan agama Kristen yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformatif. Kurikulum ini mengintegrasikan ortodoksi, ortopraksis, dan ortopati sebagai fondasi pedagogis, serta menghadirkan metode kontekstual seperti studi kasus dan pembelajaran naratif. Kurikulum ini tidak hanya membentuk murid yang setia secara doktrinal, tetapi juga mampu bersikap kritis, etis, dan solider dalam menghadapi dinamika *Woke Culture* dan kompleksitas masyarakat digital masa kini.

Referensi

Abdillah, Aldi, dan Anggi Maringan Hasiholan. "Beri Aku Air Hidup, Tuhan!": Seru Perempuan Samaria dan Gen-Z (Suatu Tafsir Kontrapuntal Yohanes 4:14 Sebagai Laku Spiritualitas Generasi Z Indonesia Era Postmodern)." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 5, no. 2 (2021): 176–91. <https://doi.org/10.37368/ja.v5i2.291>.

- Altamira, Melisa Bunga, dan Satwika Gemala Movementi. "Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 37–45. <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1177>.
- Editorial. "Woke Sociology, Woke Jesus." *Journal of Sociology and Christianity* 14, no. 1 (2024): 14–18.
- Gardner, Susan, and Wayne Henry. "Education in the Age of Woke." *Journal of Didactics of Philosophy* 8 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.46586/jdph.2024.11354>.
- Hasiholan, Anggi Maringan. "Spiritualitas Dan Teologi Sosial Pentakostal Asia." *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 358–77.
- Hefni, Wildani. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>.
- Karimah, Sofwa Nurul. "Cancel Culture di Indonesia: Membawa Perubahan atau Hanya Sanksi Sesaat?" Kompasiana.com, November 14, 2024. <https://www.kompasiana.com/sofwanurulkarimah8598/66f2bdb3ed641513f937f332/cancel-culture-di-indonesia-membawa-prubahan-atau-hanya-sanksi-sesaat>.
- Land, Steven Jack. *Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom*. New York: Sheffield Academic Press, 2010.
- Paché, Gilles. "Woke Culture Syndrome: Is Research in Management Under Threat?" *Journal of Management Research* 14, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.5296/jmr.v14i1.19323>.
- Peters, Rebecca Todd. *Solidarity Ethics Transformation In a Globalized World*. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014.
- — —. *Trust Women: A Progressive Christian Argument for Reproductive Justice*. Boston: Beacon Press, 2018.
- Roderick, Ellen. "Woke Culture in Canada? Anthropological Errors and Opportunities for Mission." *Roczniki Teologiczne* 69, no. 3 (2022): 71–101. <https://doi.org/10.18290/rt22693.6>.
- Sianipar, Ronald, Hendrik Bernadus Tetelepta, Tafonao Talizaro, Otieli Harefa, dan Jan Lukas Lombok. "Problematika Pengajaran Pendidikan Agama Kristen di Indonesia: Perspektif Regulasi, Kurikulum, dan Sarana Prasarana." *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 145–54.
- Tarsidi, Deni Zein, Karim Suryadi, Dasim Budimansyah, and Rahmat Rahmat. "Social Media Usage and Civic Engagement among Indonesian Digital Natives: An Analysis." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20, no. 2 (2023): 257–69. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>.
- Ward, Fiona, Charley Ross, and Ali Pantony. "A Complete Breakdown of the J.K. Rowling Transgender Comments Controversy." *Glamour*, June 15, 2024. <https://www.glamourmagazine.co.uk/article/jk-rowling-transgender-comments-controversy>.
- Widger, Brenda L. "Woke Religion: Effects of Secularism and Progressive Politics on 21st Century Mainline Churches as Demonstrated Through the Worship and Witness of College-Age Students." PhD diss., Liberty University, 2023.
- Wyman, Jason A. *Constructing Constructive Theology: An Introductory Sketch*. Minneapolis: Fortress Press, 2017.